

## MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PETANI MELALUI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN POLOKARTO

**Sapja Anantanyu, D. Padmaningrum, dan Sutarto**

*Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian*

*Fakultas Pertanian UNS*

### ABSTRACT

In developing countries, however, the farmer organizations are still weak in one side and there are a variety of constraints in development of such organizations in other side. Similar experience occurs with farmer organizations in District of Sukoharjo. With this context, it is necessary for the agricultural servive to carry out an action plan to promote farmer organizations in order to enhance self reliance of the organizations. A conceptual framework should be formulated based on the following considerations : (a) continue the existing programme of farmer organizations developed and its improvement in the future; (b) analyze the strengths and weakness of the existing farmer organizations; (c) establish the ideal conditions of the farmer organizations, especially in term of self reliance.

This study formulates an alternative framework for intervention which cover the followings : (a) increase the capacity of extension agents, especially in delivering guidance and technical assistant; (b) increase the capacity of farmer organizations to formulate participatory plan; (c) enhance the role of axtension agents, especially in facilitating the activities of farmer organizations.

Improvement of the capacity of farmer organizations can be done through increasing motivation (AMT), master of technique of productive activities and it is important to assist the organizations for their marketing products. Motivation and stimulation services should be directed to self reliance process of the farmer organizations and the members.

Keywords : farmer organization, self reliance, extension agents, participatory plan

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara agraris karena dari 193 juta hektar luas daratan Indonesia 73,22 persennya (46,9 juta hektar) lahan tersebut digunakan untuk usaha pertanian (Statistik Indonesia, 2001). Pertanian merupakan sektor yang tidak boleh diabaikan, sebab sektor pertanian masih menjadi tumpuan penghidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja 90,8 juta orang, 43,77 persennya bekerja di sektor pertanian, sedangkan yang bekerja di sektor perdagangan sebesar 19, 24 persen, sektor perindustrian sebesar 13,31 persen, dan sektor jasa 12,12 persen (Statistik Indonesia, 2001).

Kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan unit usaha yang

relatif sempit. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Masih rendahnya taraf kesejahteraan petani terlihat dari hasil sementara Sensus Pertanian (SP) 2003 yang dibandingkan dengan SP 1993. Jumlah petani gurem (kecil) dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar baik milik sendiri atau menyewa, meningkat 2,6 persen per tahun, dari 10,8 juta rumah tangga tahun 1993 menjadi 13,7 juta rumah tangga tahun 2003. Persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan juga meningkat dari 52,7 persen (1993) menjadi 56,5 persen (2003). Jumlah rumah tangga pertanian sendiri tercatat bertambah 2,2 persen per tahun dari 20,8 juta (1993) menjadi 25,4 juta (2003). Kenaikan persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga

pertanian pengguna lahan mengindikasikan semakin miskinnya petani di Indonesia (Kompas 3 Januari 2004).

Pembangunan sektor pertanian sudah selayaknya tidak hanya berorientasi pada produksi atau terpenuhinya kebutuhan pangan secara nasional, tetapi juga harus meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. Pembangunan pertanian merupakan bagian yang terintegral dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pembangunan yang sudah dilakukan semestinya mengandung nilai-nilai : (a) Tercapainya *swasembada*, dalam arti kemampuan masyarakat untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan; (b) Peningkatan *harga diri*, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk dapat hidup mandiri terlepas dari penindasan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka; dan (c) Diperolehnya *kebebasan*, dalam arti kemampuan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan terus menerus bagi setiap individu maupun seluruh warga masyarakatnya.

Di masa mendatang sektor pertanian akan menghadapi persoalan yang semakin serius yang memerlukan antisipasi secara tepat. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi semakin menempatkan sektor pertanian di Indonesia pada posisi sulit. Globalisasi berarti perubahan total dalam lingkungan tata niaga produk pertanian di dunia, disamping perubahan-perubahan lain yang menyangkut masalah proses alih teknologi pertanian dan sebagainya. Pada era tersebut Indonesia tidak hanya memproduksi produk-produk pertanian tetapi juga menjadi pasar dari produk-produk pertanian dari negara lain sehingga terjadi persaingan antara petani satu negara dengan negara lain.

Dalam menghadapi tantangan perekonomian pasar serta menyongsong era globalisasi, keberhasilan proses pembangunan pertanian tergantung pada penguasaan teknologi pertanian oleh petani dan kemampuan bersaing dari para petani dari suatu negara. Kondisi ini akan sulit mengingat kebanyakan pelaku usaha pertanian di Indonesia adalah petani-petani kecil. Skala

usaha yang kecil menghambat petani meningkatkan pendapatannya (Reed, 1979:14). Di sisi lain, petani hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk memanfaatkan waktu luang bagi usaha di luar usaha pertanian (*off-farm* atau *on-farm*). Usaha petani tidak cukup besar untuk merespon kelebihan tenaga kerja.

Untuk itu pemerintah dan berbagai pihak yang mempunyai komitmen terhadap eksistensi masyarakat petani berusaha untuk meningkatkan kemampuan petani agar mempunyai daya saing. Upaya meningkatkan daya saing petani salah satunya adalah pengembangan kelembagaan pertanian, pemberdayaan, pematapan, dan peningkatan kemampuan kelompok-kelompok petani kecil (Kartasasmita, 1997:31-32). Petani-petani kecil sebaiknya digerakkan untuk bergabung secara kolektif dalam suatu kelompok-kelompok, organisasi atau kelembagaan agar menjadi satu unit kekuatan produksi yang besar, tangguh dan memiliki produktivitas tinggi. Penumbuhan kelompok-kelompok sekunder masyarakat tani, selain meningkatkan produktivitas usaha juga akan meningkatkan efisiensi usaha pertanian. Reed (1979:14) menawarkan dua alternatif untuk mengatasi permasalahan petani kecil, yaitu : (a) Konsolidasi lahan usahatani menjadi usaha yang lebih luas, dan (b) Memperluas skala pengelolaan dan penggunaan sumber daya usahatani tanpa mengubah pemilikan petani, melalui usahatani korporasi atau kelompok.

Organisasi atau kelembagaan petani diakui sangat penting untuk pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya organisasi petani di negara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan organisasi atau kelembagaan pada masyarakat petani. Intervensi yang terlalu besar dari pemerintah atau politisi seringkali menyebabkan organisasi itu bekerja bukan untuk petani tetapi lebih melayami kepentingan pemerintah atau para pengelolanya (van den Ban dan Hawkins, 1999:265). Perbedaan sosial dan cultural masyarakat petani di negara berkembang dengan asal bentuk kelembagaan yang diadopsi menyebabkan kelembagaan petani yang dibangun tidak berkembang. Bunch

(1991:270-271) menegaskan pembangunan lembaga tidak sekedar memindahkan kerangka organisasi, tetapi juga harus memberikan 'perasaan' tertentu. Ciri-ciri masyarakat, perasaan, ketrampilan, sikap, dan sikap moral, merupakan darah dan daging suatu lembaga.

Pembangunan kelembagaan bagi masyarakat petani dianggap penting karena beberapa alasan. Pertama, banyak masalah pertanian yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga petani. Berbagai pelayanan kepada masyarakat petani, seperti: pemberian kredit, pengelolaan irigasi, penjualan bahan-bahan pertanian, dan sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut dapat berperan sebagai perantara antara lembaga-lembaga pernerintah atau lembaga-lembaga swasta dalam rangka sebagai saluran komunikasi atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kedua, organisasi masyarakat memberikan kelanggengan atau kontinuitas pada usaha-usaha untuk menyebarkan dan mengembangkan teknologi, atau pengetahuan teknis kepada masyarakat. Ketiga, untuk menyiapkan masyarakat agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang terbuka. Masyarakat memperkuat diri dengan mengorganisir dalam suatu organisasi. Melalui organisasi tersebut masyarakat memperoleh pengala-man-pengalaman yang berharga dalam mengelola sumberdaya pertanian (Bunch, 1991:267-268). Kerjasama petani dapat mendorong penggunaan sumberdaya lebih efisien, sarana difusi inovasi dan pengetahuan (Reed, 1979:29).

Kegiatan bersama (*group action*) oleh para petani diyakini oleh Mosher (1991:156) sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian. Dipaparkan lebih lanjut bahwa tidak semua aktivitas petani harus dilakukan secara bersama atau kolektif. Aktivitas bersama sangat diperlukan apabila dengan kebersamaan tersebut akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Ada kerjasama yang bersifat informal di beberapa masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tradisional, di Indonesia kegiatan semacam itu lebih dikenal dengan istilah gotong-royong, serta ada juga kerjasama antar petani yang bersifat lebih formal. Kerjasama kelompok dalam proyek-proyek yang bersifat membangun memerlukan pengorganisasian dengan ketrampilan-ketrampilan khusus sehing-

ga sangat diperlukan dorongan dan bantuan secara sistematis.

Upton dan Anthonio (1965:109) menjelaskan berbagai cara bisa dilakukan para petani untuk mandiri melalui aktivitas kerjasama (*co-operation*). Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai hal, antara lain:

- (a) Pemrosesan (*processing*), kerjasama dalam pemrosesan produksi pertanian dan peternakan, seperti: kopi, ketela, susu dan sebagainya. Dengan kerjasama pemrosesan akan lebih cepat, efisien dan murah.
- (b) Pemasaran (*marketing*), pengorganisasian dalam pemasaran produk pertanian. Dalam pemasaran diperlukan penyimpanan dan transportasi untuk memperoleh harga yang layak. Dengan kerjasama ini akan meyakinkan pembeli atas kualitas dan meningkatkan posisi tawar petani.
- (c) Pembelian (*buying*), pembelian atas sarana produksi pertanian, seperti: benih, pupuk, alat-alat, dapat dilakukan secara kolektif karena dengan pembelian dalam jumlah besar akan mendapatkan harga lebih murah.
- (d) Pemakaian alat-alat pertanian (*machine sharing*), dengan penggunaan bersama atas suatu alat pertanian berarti akan menurunkan biaya atas pembelian alat tersebut.
- (e) Kerjasama pelayanan (*co-operative services*), di berbagai tempat petani menyediakan pelayanan untuk kepentingan bersama, seperti: listrik, kawin suntik ternak, dan sebagainya. Dengan pengelolaan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan anggota.
- (f) Bank kerjasama (*co-operative bank*), dengan menghimpun dana tabungan anggota akan menghasilkan jumlah dana yang besar sehingga mampu membantu anggota atas kebutuhan usahatani. Pernerintah dan lembaga yang lain biasanya, mendorong dalam, pengadaan dana awal.
- (g) Kerjasama usahatani (*co-operative farming*), bentuk kerjasama secara tertutup dalam budidaya tanaman atau ternak. Dengan kerjasama tersebut diperoleh keuntungan lebih tinggi dan keseragaman produk yang dihasilkan.
- (h) Kerjasama multi-tujuan (*multi-purposeco-operatives*), merupakan kombinasi bentuk kerjasama satu dengan yang lain. Kerjasama

ini sesuai dikembangkan di negara berkembang dengan minat yang sama dari petani.

Selain itu, sumberdaya-sumberdaya pertanian perlu didorong untuk dikelola secara optimal dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing sektor pertanian. Dalam hal ini penyuluhan pertanian memiliki peran strategis melalui upaya pengembangan pemberdayaan petani. Slamet (2003:52) menegaskan penyuluhan pertanian masa depan perlu didasarkan pada visi dan misi yang lebih jelas menempatkan petani dan usahatani sebagai sentral; pendekatan yang lebih humanistik, yaitu melihat petani sebagai manusia yang berpotensi, yang dihargai untuk dikembangkan kemampuannya menuju kemandiriannya. Dalam kaitan itu orientasi visi dan misi kelembagaan penyuluhan kembali ke khittah penyuluhan itu sendiri, yaitu pengembangan pemberdayaan petani sehingga petani lebih mampu meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakatnya secara mandiri dan tidak ter subordinasi oleh kepentingan pihak lain dalam mengembangkan usaha taninya.

Kemandirian sendiri adalah sebuah konsep yang utuh, tetapi memiliki berbagai muka dan tercermin dalam berbagai bidang kehidupan (Kartasasmita, 1997:22). Kemandirian (self-reliance) pertanian mengandung pengertian yang lebih jauh dari swasembada (self-sufficiency) yang secara hakiki menuntut kebutuhan dari produksi sendiri. Kemandirian di tingkat petani adalah menciptakan penerimaan yang mampu menutupi pengeluarannya. Dengan perkataan lain, kemandirian merupakan fungsi dari berbagai peubah bebas yang berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan, yakni efisiensi, sistem perdagangan, laju ekspor, sistem moneter dan kelembagaan yang inovatif serta organisasi yang bersifat adaptif (Amang, 1997: 1).

Verhagen (1996:22) mengemukakan bahwa kemandirian (self-reliance) adalah suatu suasana atau kondisi tertentu yang membuat seorang individu atau sekelompok manusia yang telah mencapai kondisi itu tidak lagi tergantung pada bantuan, atau kedermawanan pihak ketiga untuk mengamankan kepentingan individu atau kelompok. Kemandirian adalah perwujudan

kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dicirikan oleh kemampuan dan kebebasan menentukan pilihan yang terbaik (Hubeis, 1992). Menurut Wardi dalam Mulyandari (1991), petani yang mampu mewujudkan pertanian mandiri adalah petani yang memiliki karakter: 1) mampu memanfaatkan keanekaragaman sumberdaya pertanian secara optimal melalui kekuatan/kemampuan sendiri; 2) mampu memanfaatkan teknologi pertanian yang rujuk lingkungan, serta tidak menutup diri terhadap berlangsungnya transformasi teknologi yang lebih menguntungkan (integrasi teknologi local dengan teknologi dari luar secara selektif); 3) mampu mengembangkan keunggulan komparatif; dan 4) memiliki kemampuan manajerial dan ketrampilan mengelola usaha secara bisnis.

Slamet (2000) berpendapat bahwa untuk membina dan menumbuhkan kemandiriannya, petani perlu diarahkan agar dengan kekuatan dan kemampuannya berupaya untuk bekerjasama dalam mencapai segala yang dibutuhkan dan diinginkan. Kemandirian tidak berarti anti terhadap kerja sama atau menolak saling keterkaitan dan ketergantungan. Kemandirian justru menekankan perlunya ada kerja sama disertai tumbuh dan berkembangnya aspirasi, kreativitas, keberanian menghadapi resiko, dan prakarsa seseorang untuk bertindak atas dasar kekuatan sendiri dalam kebersamaan.

Petani yang mandiri menurut Sumarjo dalam Mulyandari (2001) berarti mampu mengambil keputusan dalam mengelola usahatannya secara cepat, tepat, tanpa harus bergantung atau ter subordinasi oleh pihak lain, mampu beradaptasi secara optimal dan inovatif terhadap berbagai perubahan lingkungan fisik dan sosialnya, serta mampu bekerjasama dengan pihak lain dalam situasi yang saling menguntungkan sehingga terjadi kesalingketergantungan dan bukan ketergantungan. Petani yang mandiri juga dicirikan oleh perilakunya yang efisien dan berdaya saing tinggi. Berperilaku efisien berarti berpikir dan bertindak disertai dengan sikap positif dalam menggunakan sarana secara tepat guna atau berdaya guna. Perilaku berdaya saing tinggi artinya dalam berpikir dan bertindak senantiasa disertai

sikap berkarya dalam hidup yang berorientasi pada mutu dan kepuasan konsumen atas produk atau jasa yang dihasilkan.

Kemandirian petani dalam berusahatani, secara praktis dapat dilihat dalam berbagai segi, yaitu kemampuan dalam pemilihan jenis komoditi yang diusahakan, penentuan harga komoditi yang dihasilkan, akses terhadap sarana produksi pertanian, kemampuan memahami pasar, kemampuan dalam bekerjasama, kemampuan untuk mencari informasi dan pengetahuan dalam berusahatani.

Pengelolaan sumberdaya usahatani menyangkut pengaturan masukan dan keluaran dalam proses produksi usahatani sehingga mencapai produktivitas yang tinggi. Untuk menjalankan proses produksi pertanian, petani tidak hanya menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai mengenai input dan teknik budidaya pertanian, tetapi juga harus memahami kondisi alam, seperti: cuaca. Untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang optimal tidak jarang petani harus menjalankan usaha bersama secara kolektif dengan petani lain. Untuk keperluan ini diperlukan pemahaman mengenai suatu kelembagaan petani.

Kelembagaan petani yang diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi petani, sampai saat ini belum berfungsi secara optimal. Kelembagaan pertanian kurang menempatkan petani sebagai pengambilan keputusan dalam usahatannya, karena dominansi pengaruh intervensi pihak luar petani terhadap kelompok tani (Slamet, 2003:50). Pengembangan kelembagaan melalui penyuluhan pertanian justru menempatkan petani pada berbagai kelompok binaan yang dibentuk dari atas dan untuk kepentingan atas, sehingga posisi petani lemah dalam pengambilan keputusan kelompok. Kurang berhasilnya proyek-proyek pertanian yang berorientasi pada pembangunan kelembagaan petani. Seperti KUD, *corporate farming*, dan kelompok-kelompok usaha bersama yang lain; menunjukkan masih perlu kajian yang mendalam terhadap kelembagaan petani.

#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kaji tindak, yaitu dengan mengkaji permasalahan yang dihadapi

oleh masyarakat terkait dengan kelembagaan, kemudian merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah dan memilihnya untuk diimplementasikan. Kelembagaan dipahami sebagai suatu fenomena interaksi social masyarakat dalam mekanisme pertahanan diri untuk menghadapi situasi. Penggalan data penelitian menggunakan metode survei serta teknik *focus group discussion* (FGD). Analisis data dilakukan mengacu pada paradigma kuantitatif yang dilengkapi dengan informasi kualitatif untuk mempertajam analisis. Setelah merumuskan permasalahan di lapangan dilakukan kajian untuk mendapatkan alternatif pemecahan permasalahan. Intervensi dalam bentuk penguatan dilakukan melalui kegiatan terpilih, yang akan dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Sedangkan wilayah penelitian ditetapkan di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Adapun pertimbangan dari pemilihan lokasi diantaranya karena Desa Wonorejo merupakan desa mitra dari Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dalam rangka pengembangan pusat kajian dan informasi pertanian. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kelompok tani di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto, maka ditetapkan metode wawancara serta teknik *focuss group discussion* (FGD). Peserta FGD merupakan sebagian dari responden yang telah diwawancarai sebelum FGD dilaksanakan serta penyuluh pertanian. Hal ini ditetapkan dengan pertimbangan agar diskusi berlangsung lebih efektif, dimana peserta ditentukan sendiri oleh kelompok tani-nya serta dapat melihat permasalahan kelompok dari berbagai sudut pandang.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Kemandirian Dilihat dari Kekuatan dan Kelemahan Kelompok Tani

Berdasarkan pengamatan dan wawancara terhadap kelompok tani, serta hasil diskusi kelompok terarah (FGD) dapat dirumuskan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tani yang menjadi obyek pengamatan. Kelebihan yang dimiliki merupakan kekuatan-kekuatan yang dapat dikembangkan untuk lebih mendinamiskan dan

memajukan kelompok. Kekurangan yang dimiliki merupakan wujud kelemahan-kelemahan yang membutuhkan penanganan atau intervensi yang diperlukan agar kelompok tani bisa dinamis dan pada akhirnya bisa mencapai kemandirian. Beberapa kelebihan yang dapat diidentifikasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

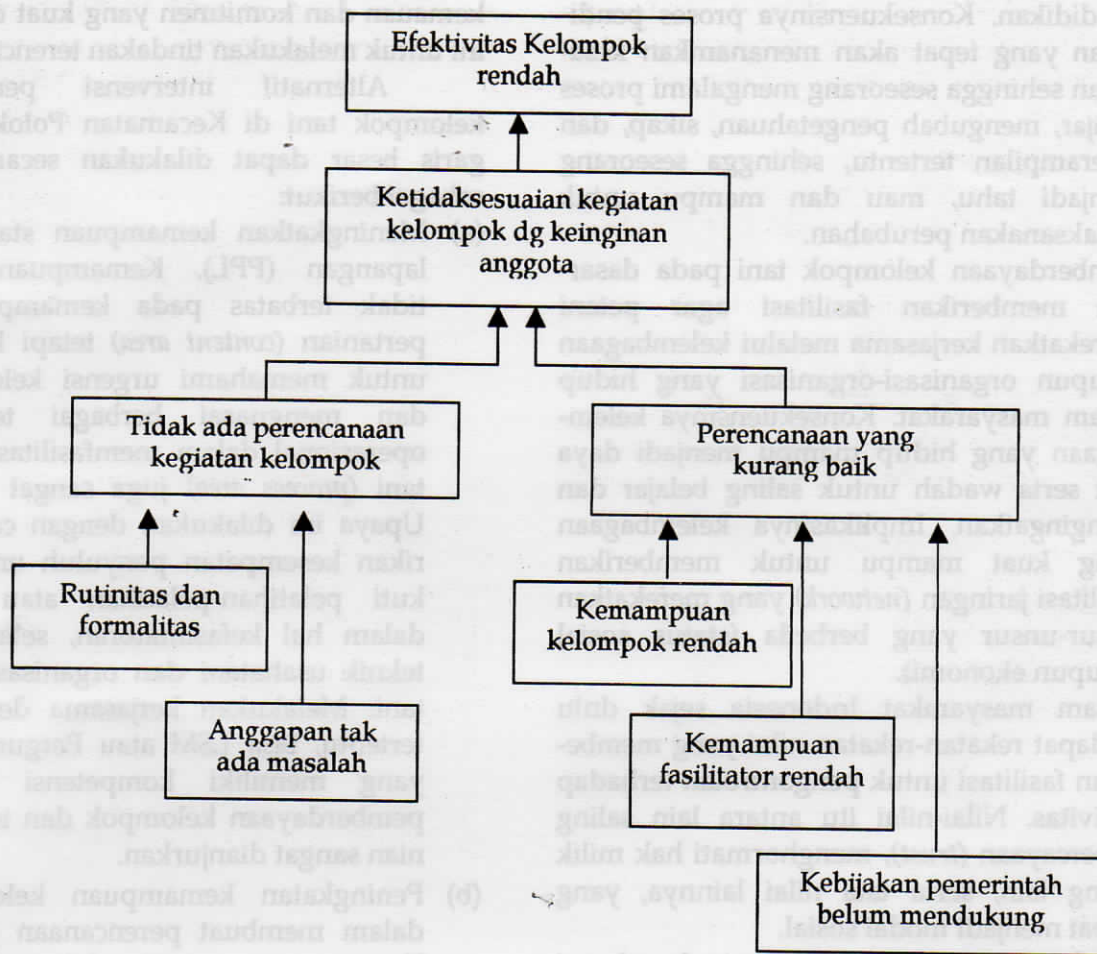
- (a) Adanya komitmen dari pemerintah melalui dinas terkait untuk terus-menerus dan senantiasa memperhatikan kepentingan petani. Berbagai upaya pembinaan yang dilakukan terhadap petani dan kelompok tani merupakan wujud dan manifestasi kepedulian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- (b) Ada kesadaran petani untuk mengakui bahwa keberadaan kelompok sangat diperlukan untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan usahatani. Dari aspek sosial dan budaya, dorongan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dalam suatu kesatuan adalah suatu kebutuhan. Berbagai aktivitas bersama yang dirasakan manfaatnya memberikan dorongan bagi petani untuk senantiasa merasa nyaman dan merasa satu keluarga dalam ikatan kelompok tani.
- (c) Struktur kelompok sudah terlembagakan. Secara tradisional petani sudah mengembangkan cara-cara kerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang lebih dikenal dengan 'gotong-royong' dan 'tolong-menolong'. Namun seiring dengan kemajuan dan perkembangan jaman, bentuk-bentuk kerjasama ini perlu dilembagakan dalam format yang lebih modern seperti kelompok tani. Keberadaan kelompok akan memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan memfokuskan bantuan atau fasilitas yang dapat dikelola

oleh kelompok, disamping terjadi proses pembelajaran melalui interaksi yang terjadi.

Kelemahan-kelemahan yang akan dibahas dalam uraian berikut merupakan hasil abstraksi dari data-data yang diperoleh. Melalui analisis dinamika kelompok minimal ada dua hal yang menunjukkan adanya kelemahan kelompok tani pada umumnya di Kecamatan Polokarto, yaitu: (a) Kesesuaian kegiatan kelompok tani dengan keinginan anggota masih rendah, dan (b) Efektivitas kelompok tani masih rendah.

Rendahnya kesesuaian kegiatan kelompok tani dengan keinginan anggota menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini belum mampu mengakomodasi kepentingan anggota. Harus dimaklumi, selama ini keberadaan kelompok tani masih merupakan alat kepentingan pemerintah sehingga pembinaan yang dilakukan petugas/penyuluh lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah. Usaha untuk mengamankan swasembada pangan yang menjadi target pemerintah menjadi prioritas utama sehingga mengalahkan kepentingan petani. Petani masih merasakan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam usahatani belum sepenuhnya terakomodasi dengan adanya kelompok tani.

Efektivitas kelompok yang rendah terjadi sebagai akibat dari ketidak sesuaian kegiatan kelompok tani dengan keinginan anggota. Efektivitas kelompok dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan kelompok atau tingkat kepuasan anggota terhadap kelompok. Secara skematis secara umum kelemahan kelompok tani di Kecamatan Polokarto dan faktor-faktor yang menyebabkannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kelemahan Kelompok Tani dan Penyebabnya

Dari Gambar 1 memperlihatkan bahwa kegiatan kelompok tani selama ini belum direncanakan dengan baik atau bahkan tidak ada perencanaan sama sekali. Yang banyak terjadi, kegiatan kelompok tani hanya merupakan kegiatan rutin setiap musim atau setiap tahun tanpa memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani. Petani merasa tidak ada masalah yang perlu dipecahkan, sedangkan pihak penyuluh sendiri menganggap tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh petani sehingga merasa tidak perlu melakukan inisiasi gagasan-gagasan baru. Hal ini seringkali terjadi karena paradigma penyuluhan yang selama ini digunakan lebih bersifat *top-down*. Petani belum ditempatkan sebagai subyek atau pelaku pembangunan pertanian yang utama. Kemampuan penyuluh masih rendah dalam memfasilitasi petani sehingga mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Di sisi lain, petani dalam kelompok tani belum

mempunyai kemampuan teknis dalam merumuskan permasalahan yang dihadapi dan menentukan alternatif pemecahannya secara kolektif. Kondisi ini terjadi karena selama ini petani tidak dibiasakan untuk memecahkan permasalahannya sendiri sehingga kurang tumbuh kepercayaan diri, kemandirian (*self reliance*), dan kemampuan memecahkan masalah sendiri dalam rangka mengatasi persoalan hidupnya.

#### Merumuskan Alternatif Intervensi Pemberdayaan Kelompok Tani

Terdapat beberapa alasan penting sehingga pemberdayaan kelompok tani atau pengembangan kelembagaan petani dapat menjadi proses fasilitasi untuk menuju masyarakat yang lebih mandiri:

- (a) Pemberdayaan kelompok tani adalah proses bertahap (*incremental process*) melalui proses

pendidikan. Konsekuensinya proses pendidikan yang tepat akan menanamkan kesadaran sehingga seseorang mengalami proses belajar, mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu, sehingga seseorang menjadi tahu, mau dan mampu untuk melaksanakan perubahan.

- (b) Pemberdayaan kelompok tani pada dasarnya memberikan fasilitasi agar petani merekatkan kerjasama melalui kelembagaan ataupun organisasi-organisasi yang hidup dalam masyarakat. Konsekuensinya kelembagaan yang hidup mampu menjadi daya ikat serta wadah untuk saling belajar dan mengingatkan. Implikasinya kelembagaan yang kuat mampu untuk memberikan fasilitasi jaringan (*network*) yang merekatkan unsur-unsur yang berbeda (status sosial maupun ekonomi).
- (c) Dalam masyarakat Indonesia sejak dulu terdapat rekatan-rekatan nilai yang memberikan fasilitasi untuk pengontrolan terhadap aktivitas. Nilai-nilai itu antara lain saling kepercayaan (*trust*), menghormati hak milik orang lain, serta tata nilai lainnya, yang dapat menjadi modal sosial.

Sebuah kerangka konseptual, sebagai alternatif intervensi, yang akan dirumuskan dalam kajian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: (a) Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh institusi terkait dengan kelompok tani, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, (b) Kekuatan dan kelemahan yang ada di kelompok-kelompok tani yang ada, serta (c) Kondisi yang diinginkan atau akan dicapai oleh kelompok tani sehingga menjadi kelompok tani yang mempunyai kemandirian dan berdaya.

Berdasarkan faktanya Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo melalui petugas lapangannya telah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani di wilayah kerjanya masing-masing. Namun harus disadari bahwa upaya-upaya pembinaan yang selama ini dilakukan perlu dikaji ulang, baik dalam aspek pendekatan maupun materi-materi yang menjadi penekanan, sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Dalam konteks ini maka harus ada

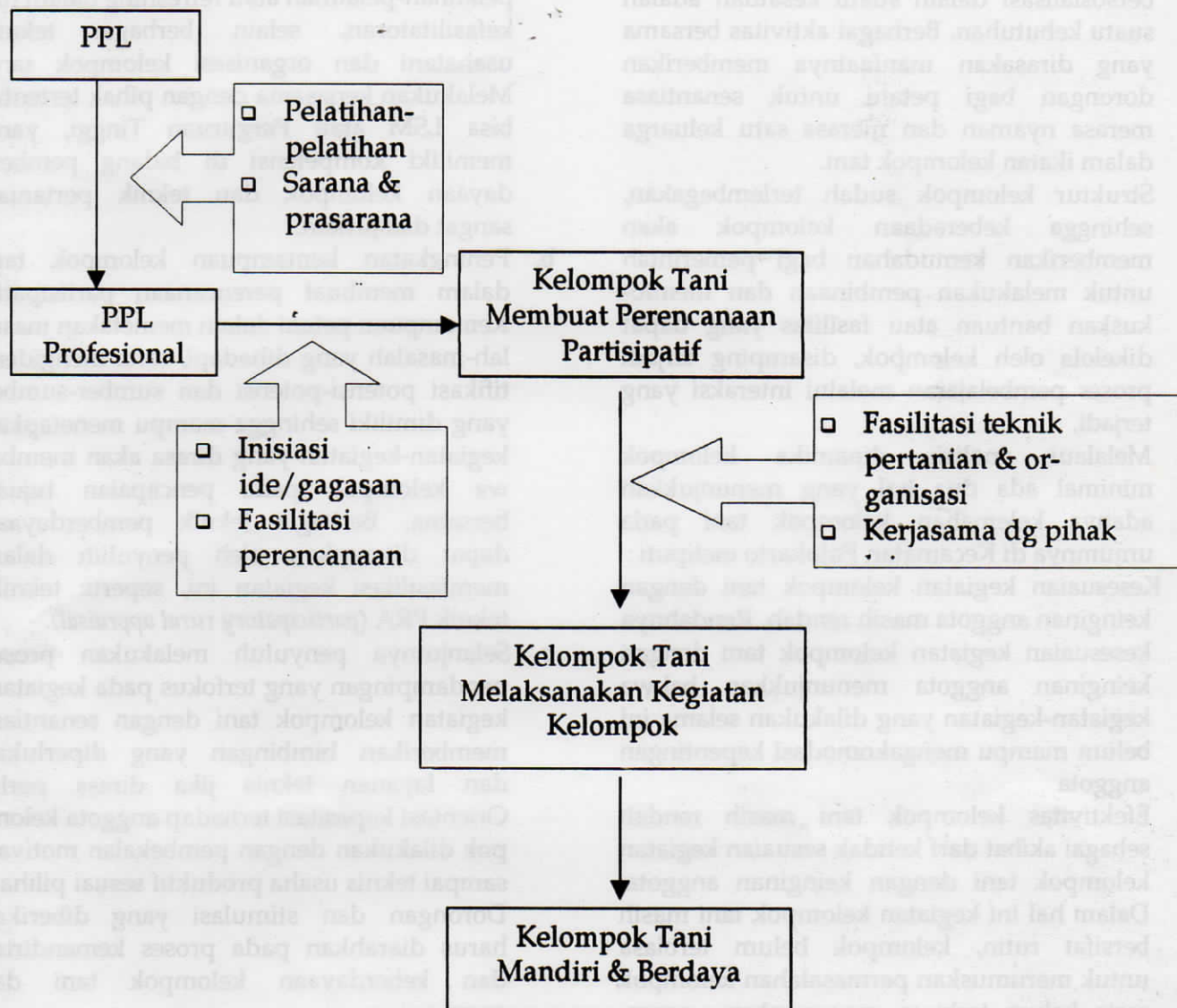
kemauan dan komitmen yang kuat dari instansi ini untuk melakukan tindakan terencana.

Alternatif intervensi pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Polokarto secara garis besar dapat dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kemampuan staf penyuluh lapangan (PPL). Kemampuan penyuluh tidak terbatas pada kemampuan teknis pertanian (*content area*) tetapi kemampuan untuk memahami urgensi kelompok tani dan menguasai berbagai teknik-teknik operasional dalam memfasilitasi kelompok tani (*process area*) juga sangat diperlukan. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan penyuluh untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau refreshing dalam hal kefasilitatoran, selain berbagai teknik usahatani dan organisasi kelompok tani. Melakukan kerjasama dengan pihak tertentu, bisa LSM atau Perguruan Tinggi, yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan kelompok dan teknik pertanian sangat dianjurkan.
- (b) Peningkatan kemampuan kelompok tani dalam membuat perencanaan partisipatif. Kemampuan petani dalam memetakan masalah-masalah yang dihadapi, serta mengidentifikasi potensi-potensi dan sumber-sumber yang dimiliki sehingga mampu menetapkan kegiatan-kegiatan yang dirasa akan membawa kelompok pada pencapaian tujuan bersama. Berbagai teknik pemberdayaan dapat diterapkan oleh penyuluh dalam memfasilitasi kegiatan ini, seperti: teknik-teknik PRA (*participatory rural appraisal*).
- (c) Selanjutnya penyuluh melakukan proses pendampingan yang terfokus pada kegiatan-kegiatan kelompok tani dengan senantiasa memberikan bimbingan yang diperlukan dan layanan teknis jika dirasa perlu. Orientasi kapasitas terhadap anggota kelompok dilakukan dengan pembekalan motivasi sampai teknis usaha produktif sesuai pilihan. Dorongan dan stimulasi yang diberikan harus diarahkan pada proses kemandirian dan keberdayaan kelompok tani dan anggotanya.



Secara skematis alternatif intervensi tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Alternatif Intervensi Kelompok Tani

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kemandirian kelompok tani di Kecamatan Polokarto apabila dilihat dari kelebihan dan kekurangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Beberapa kelebihan yang dapat diidentifikasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen dari pemerintah melalui dinas terkait untuk terus-menerus dan senantiasa memperhatikan kepentingan petani. Berbagai upaya pembinaan yang dilakukan terhadap petani dan kelompok tani merupakan wujud dan manifestasi kepedulian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- b. Ada kesadaran petani untuk mengakui bahwa keberadaan kelompok sangat diperlukan

untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan usahatani. Dari aspek sosial dan budaya, dorongan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dalam suatu kesatuan adalah suatu kebutuhan. Berbagai aktivitas bersama yang dirasakan manfaatnya memberikan dorongan bagi petani untuk senantiasa merasa nyaman dan merasa satu keluarga dalam ikatan kelompok tani.

- c. Struktur kelompok sudah terlembagakan, sehingga keberadaan kelompok akan memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan memfokuskan bantuan atau fasilitas yang dapat dikelola oleh kelompok, disamping terjadi proses pembelajaran melalui interaksi yang terjadi.
2. Melalui analisis dinamika kelompok minimal ada dua hal yang menunjukkan adanya kelemahan kelompok tani pada umumnya di Kecamatan Polokarto meliputi:
  - a. Kesesuaian kegiatan kelompok tani dengan keinginan anggota masih rendah, Rendahnya kesesuaian kegiatan kelompok tani dengan keinginan anggota menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini belum mampu mengakomodasi kepentingan anggota
  - b. Efektivitas kelompok tani masih rendah sebagai akibat dari ketidaksesuaian kegiatan kelompok tani dengan keinginan anggota. Dalam hal ini kegiatan kelompok tani masih bersifat rutin, kelompok belum terbiasa untuk merumuskan permasalahan kelompok serta belum terbiasa merumuskan perencanaan yang baik.

#### Saran

Alternatif intervensi pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Polokarto secara garis besar dapat dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan staf penyuluh lapangan (PPL). Kemampuan penyuluh tidak terbatas pada kemampuan teknis pertanian (*content area*) tetapi kemampuan untuk memahami urgensi kelompok tani dan menguasai berbagai teknik-teknik operasional dalam memfasilitasi kelompok tani

(*process area*) juga sangat diperlukan. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan penyuluh untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau refreshing dalam hal kefasilitatoran, selain berbagai teknik usahatani dan organisasi kelompok tani. Melakukan kerjasama dengan pihak tertentu, bisa LSM atau Perguruan Tinggi, yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan kelompok dan teknik pertanian sangat dianjurkan.

- b. Peningkatan kemampuan kelompok tani dalam membuat perencanaan partisipatif. Kemampuan petani dalam memetakan masalah-masalah yang dihadapi, serta mengidentifikasi potensi-potensi dan sumber-sumber yang dimiliki sehingga mampu menetapkan kegiatan-kegiatan yang dirasa akan membawa kelompok pada pencapaian tujuan bersama. Berbagai teknik pemberdayaan dapat diterapkan oleh penyuluh dalam memfasilitasi kegiatan ini, seperti: teknik-teknik PRA (*participatory rural appraisal*).
- c. Selanjutnya penyuluh melakukan proses pendampingan yang terfokus pada kegiatan-kegiatan kelompok tani dengan senantiasa memberikan bimbingan yang diperlukan dan layanan teknis jika dirasa perlu. Orientasi kapasitas terhadap anggota kelompok dilakukan dengan pembekalan motivasi sampai teknis usaha produktif sesuai pilihan. Dorongan dan stimulasi yang diberikan harus diarahkan pada proses kemandirian dan keberdayaan kelompok tani dan anggotanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Amang, Beddu. 1997, "Pidato Ketua Umum PP PERHEPI pada Konpernas XII Denpasar Bali 9 Agustus 1996" dalam *Membangun Kemandirian dan Daya Saing Pertanian Nasional dalam Menghadapi Era Industrialisasi dan Perdagangan Bebas*. Prosiding Konferensi nasional XII PERHEPI.

Biro Pusat Statistik. 2001. *Statistik Indonesia 2001*. BPS. Jakarta

- Bunch, Roland. 1991. *Dua Tongkol jagung : Pedoman Pengembangan Pertanian Berpangkal Pada Rakyat*. Terjemahan oleh Ilya Moelyono. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hubeis, A. V. S., 1992. *Strategi Penyuluhan Pertanian sebagai Salah Satu Upaya Menswadayakan Petani-Nelayan*. Makalah Seminar Sehari dalam Rangka Ulang Tahun ke-V Perheptani, tanggal 1 Desember 1992.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. "Meningkatkan Daya Saing Pertanian Dalam Rangka mewujudkan Kemandirian Ekonomi Nasional" dalam *Membangun Kemandirian dan Daya Saing Pertanian Nasional dalam Menghadapi Era Industrialisasi dan Perdagangan Bebas*. Prosiding Konferensi Nasional XII PERHEPI.
- Kompas tanggal 3 Januari 2003. "2003, Inflansi 5,06 Persen, Jumlah Petani Gurem Meningkat".
- Mulyandari, Retno Sri Hartati. 2001. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kemandirian Petani Melalui Penyuluhan*. Kasus di Desa Ciharang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tesis. Tidak Dipublikasikan.
- Mosher, A.T. 1991. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian: Syarat-syarat Pokok Pembangunan Pertanian dan Modernisasi*. CV. Yasaguna. Jakarta.
- Reed, Wdward. 1979. "Two Approaches to Cooperation in Rice Production in South Korea" dalam *Group Farming In Asia*. Editor John Wong. Singapore University Press. Kent Ridge., Singapore.
- Slamet, M. 2000. *Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan*. Disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani. Bogor, 25-26 September 2000.
- Slamet, Margono. 2003. "Menata Sistem Penyuluhan Pertanian menuju Pertanian Modern" dalam *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Penyunting Ida Yustina dan Ajad Sudradjat. IPB Press. Bogor.
- Upton, M dan Q.B.O. Anthonio. 1965. *Farming as Business*. Oxford University Press. New York.
- Van den Ban, A. W dan H.S. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Terjemahan oleh A.D. Herdiastuti. Kanisius. Yogyakarta.
- Verhagen, Koenraad. 1996. *Pengembangan Keswadayaan: Pengalaman LSM di Tiga Negara*. Terjemahan. Puspa Swara. Jakarta.
- Von Blanckenarug, Peter dan Reinhold Sachs. 1989. "Masyarakat tani dalam Membangun" dalam *Sosiologi Pertanian*. Penyunting Ulrich Planck. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.